

## POTENSI *RUSH MONEY* DALAM PERTIMBANGAN MELAKUKAN AUDIT EKSTERNAL LEMBAGA PERKREDITAN DESA

I Made Sara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Email: [madesara022@gmail.com](mailto:madesara022@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel kepemilikan, ukuran (*size*), potensi *rush money* dan pengawasan terhadap kebutuhan dilakukannya audit eksternal di lembaga perkreditan desa. Penelitian ini dilakukan di seluruh LPD di Provinsi Bali dengan populasi 1.327 LPD, namun yang menjadi sampel adalah sejumlah 93 lembaga. Pengumpulan data dilakukan dengan survey menggunakan kuesioner. Dan data yang terkumpul dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Hasilnya adalah bahwa variabel kepemilikan dan ukuran LPD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan LPD melakukan audit eksternal, karena kebutuhan dilakukannya audit eksternal hanyalah dilakukan disaat LPD tersebut mengalami kasus kecurangan atau kehilangan dana nasabah ataupun kasus lainnya yang berkaitan dengan kecurangan. Sedangkan variabel potensi adanya *rush money* dan pengawasan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kebutuhan dilakukannya audit eksternal. Hal ini terjadi karena dari berbagai kasus keuangan yang terjadi di lembaga keuangan hal yang paling ditakutkan adalah *rush money*, sehingga perlu untuk dicegah, sehingga begitu terdeteksi adanya kecurangan di LPD segera dilakukan audit eksternal untuk mempertahankan kepercayaan public terhadap lembaga. Selanjutnya adalah pengawasan, ini sudah tentu berkaitan erat dengan keputusan LPD untuk melakukan audit eksternal atau tidak, karena pengawasan oleh badan pengawas memiliki fungsi pendeteksian dan pencegahan dalam tindak kecurangan keuangan.

Kata Kunci: *rush money*, pengawasan, audit eksternal, lembaga perkreditan desa

### Abstrac

*The purpose of this study was to examine the influence of the variable ownership, size (size), potential rush money and supervision of the need for an external audit at village credit institutions. This research was conducted in all LPDs in Bali Province with a population of 1,327 LPDs, but the samples were 93 institutions. Data collection was carried out by survey using a questionnaire. And the collected data were analyzed using multiple linear regression method. The result is that the LPD ownership and size variables do not have a significant effect on the LPD's decision to conduct an external audit, because the need for an external audit is only done when the LPD experiences a case of fraud or loss of customer funds or other cases related to fraud. meanwhile, the variables of potential for rush money and supervision have a positive and significant effect on the need for an external audit. This happened because of the various financial cases that occurred in financial institutions the most feared thing was rush money, so it needed to be prevented, so that once fraud was detected in the LPD, an external audit was immediately carried out to maintain public trust in the institution. Next is supervision, this is of course closely related to the LPD's decision to carry out an external audit or not, because supervision by the supervisory agency has a detection and prevention function in the act of financial fraud.*

Keywords: *rush money*, supervision, external audit, village credit institutions

### Pendahuluan

LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan suatu Badan

Usaha Simpan Pinjam yang dimiliki *desa pakraman*. Tujuan pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta

penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPD melaksanakan berbagai usaha, seperti menerima simpanan dari warga masyarakat, memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, usaha-usaha lainnya yang bersifat pengerahan dana desa, penyertaan modal serta menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan (Saputra dkk., 2019).

Keberadaan LPD di masyarakat *desa pakraman* telah banyak mengalami peningkatan yang pesat. Lembaga keuangan LPD tersebut mampu meningkatkan potensi masyarakat *desa pakraman*, dan membantu masyarakat *desa pakraman* dalam kehidupannya didalam masyarakat *desa pakraman* (Putra & Latrini, 2018). Peran LPD dalam membantu masyarakat *desa pakraman* juga termasuk dalam memberikan dana untuk membangun pura dan pelaksanaan upacara, yang sebelumnya dilakukan dengan dana pribadi masyarakat *desa pakraman* (Saputra dkk., 2019). LPD juga memberikan beasiswa berupa pendidikan kepada siswa yang berprestasi sehingga dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan rentetan keberhasilan tersebut, pengaturan LPD seharusnya dikembalikan kepada identitas cultural *desa pakraman*, yaitu sifat otonomnya dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan rumah tangganya (*self regulation*) (Sujana & Saputra, 2020). LPD sebagaimana juga desa adat di Bali, diatur dengan peraturan daerah (Saputra dkk., 2019).

Terkait dengan keberadaan LPD dalam *desa pakraman*, maka LPD yang berperan sebagai lembaga komunitas *desa pakraman* yang kepemilikannya hanya diperuntukan bagi seluruh masyarakat *desa pakraman*. Hal ini justru berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro patut diapresiasi positif. Dalam UU ini

keberadaan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) diakui keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus sehingga pengaturannya dikecualikan dari UU tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: "*Lembaga Perkreditan Desa* dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan *diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat* dan tidak tunduk pada ini" (Adiputra dkk., 2014).

Fenomena yang sering terjadi adalah laporan yang dibuat oleh suatu manajemen atau pengelola LPD baik itu laporan keuangan ataupun laporan non keuangan cenderung tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah adanya ketidakjujuran yang dimiliki oleh penyusun laporan keuangan, sehingga sering terjadi pemanipulasian data yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan kadang kelemahan tersebut ditunjang pula oleh ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang standar pembuatan laporan keuangan, baik penyusunnya maupun penggunaanya (Murti et al., 2018). Hal ini sering terjadi pada LPD di Bali, kasus yang pernah terjadi adalah penyelewengan dana LPD baik oleh ketua atau pegawai, sehingga untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan LPD perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. LPD dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik jika ada permintaan dari *krama desa pakraman* selaku pemilik, maka dalam hal ini pengawas dan anggota LPD berhak untuk meminta *auditor* selaku pemeriksa kinerja keuangan organisasi memeriksa keabsahan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen LPD yang bersangkutan jika pengawas tidak mampu melakukannya (Lukman & Harun, 2018). Pengawas dalam hal ini adalah PLPDK dan BPD (Badan Pengawas Desa) selaku internal auditor LPD.

Peranan jasa audit (baik audit internal ataupun audit eksternal) adalah sebagai monitoring terhadap operasional perusahaan (Mailoor dkk., 2003). Peranan

jasa audit dalam perkembangan usaha suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan pengawasan, kredibilitas perusahaan, efisiensi dan kejujuran (Mailoor dkk., 2003; Yang *et al.*, 2019). Adanya permintaan yang besar terhadap jasa audit disebabkan oleh berkurangnya kontrol atau pengawasan pemilik terhadap perusahaan (Fukukawa & Mock, 2011). Salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat kepermukaan adalah kasus LPD Anturan-Buleleng. Permasalahan likuiditas di LPD Anturan bergulir sejak awal pandemi lalu. Saat itu lembaga keuangan ini mulai membatasi penarikan dana di LPD Anturan. Penyebabnya ada ratusan miliar yang mendadak macet, karena situasi pandemi. Kredit macet itu memberi efek domino. Karena ada deposito yang juga jatuh tempo, namun belum dapat dilakukan pencairan. Auditor diminta melengkapi data riil. Terutama terkait keberadaan aset LPD Anturan. Selama proses audit berlangsung, manajemen LPD Anturan diminta menghentikan aktivitas usaha mereka. Manajemen dan staf diminta berkonsentrasi memberikan dukungan data pada auditor, sehingga proses audit segera tuntas. Terlebih aset yang berputar di LPD Anturan tak kurang dari Rp 200 miliar. Dalam kondisi tersebut, Saat ini menjaga kepercayaan publik itu penting. Karena ini lembaga keuangan, maka *trust* (kepercayaan) (Burke *et al.*, 2007) dari publik sangat penting, agar tidak terjadi *rush* (penarikan besar-besaran) (Douglas & Franklin, 2006). Ini yang akan membuat lembaga keuangan semakin terpuruk. Potensi *Rush* ini juga yang sering membuat permintaan lembaga keuangan untuk diaudit (Wibowo, 2018). Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Choi *et al* (2010) yang mengatakan bahwa permintaan jasa audit juga dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai ukuran (*size*) perusahaan tergolong besar, perusahaan yang mempunyai proporsi hutang lebih besar dalam struktur modal serta perusahaan yang prosentase sahamnya dikuasai oleh manajer lebih kecil dibandingkan dengan yang dikuasai oleh pihak lain (Davidson & Neu, 1993). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap kepemilikan, skala, kewajiban dan pengawasan LPD terhadap kebutuhan akan audit eksternal.

## Kajian Teori

### Teori Kepemilikan

Teori kepemilikan adalah agen atau perwakilan atau pengaturan dimana wirausahawan individual atau pemegang saham beroperasi. Sudut pandang dari kelompok pemilik sebagai pusat kepentingan dicerminkan dalam cara cara dimana catatan akuntansi disimpan dan laporan keuangan disusun. Tujuan dari teori kepemilikan adalah penentuan dan analisis dari kekayaan bersih (*net worth*). Teori kepemilikan dapat memiliki dua bentuk yang berbeda dalam hal siapa yang dimasukkan dalam kelompok pemilik. Dalam bentuk pertama hanya pemegang saham biasa yang menjadi bagian dari kelompok pemilik sementara pemegang saham preferen dikeluarkan. Bentuk kedua dari teori kepemilikan baik saham biasa maupun saham preferen dimasukkan dalam ekuitas pemilik (Haryono, 2017; Putri & Nasir, 2006).

### Kepemilikan

LPD yang berperan sebagai lembaga komunitas *desa pakraman* yang kepemilikannya hanya diperuntukan bagi seluruh masyarakat *desapakraman*. LPD mengemban tujuan memelihara kebudayaan yang ada di Bali serta sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat *desa pakraman*. LPD yang keanggotaannya mencakup seluruh masyarakat *desa pakraman*, jadi yang dapat menjadi anggota pengurus LPD hanyalah masyarakat *desa pakraman* ditempat dimana LPD yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya. Perkembangan ini patut segera disikapi dengan langkah strategis dan konkret dari *desa pakraman* selaku pemilik LPD maupun pengurus LPD selaku pelaksana pengelolaan LPD (Astawa, 2012; Saputra dkk., 2019).

### Ukuran (Size)

LPD dalam cakupannya hanya melayani masyarakat dari *desa pakraman* tempat dimana LPD tersebut berada, dan tidak melayani masyarakat diluar *desapakraman*. LPD sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat *desa pakraman* mengalokasikan keuntungan atau *profit* dari kegiatannya untuk kepentingan dari masyarakat *desa pakraman* yang bersangkutan, dengan kata lain *profit* yang diperoleh oleh LPD akan kembali dan dirasakan oleh seluruh masyarakat *desa pakraman* (Dewi dkk., 2014). Ukuran LPD dalam hal ini sangat tergantung dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dimana LPD tersebut berada. Jika, semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat desa pakraman ini, maka pasti diindikasikan akan bertambahnya aset LPD yang dimiliki. Begitu juga jika perekonomian di desa pakraman tersebut maju, maka dapat diasumsikan bahwa keinginan dan minat masyarakat untuk mempercayakan LPD sebagai lembaga penyimpanan uangnya semakin tinggi pula (Mardiana dkk., 2014). Boleh dikatakan bahwa, keberadaan LPD di desa pakraman ini sangat dekat dihati masyarakatnya.

### Potensi Rush Money

*Rush money* atau bank run atau panic bank adalah salah satu istilah yang sangat terkenal sekali dalam dunia perbankan dunia. Istilah tersebut menggambarkan pada suatu kondisi dimana banyak nasabah yang melakukan penarikan uang dari tempatnya menabung secara besar-besaran. Kondisi yang harus dipahami dalam hal ini adalah kondisi ketakutan dan kepanikan para nasabah, atau ketidakpercayaan mereka pada kemampuan bank dalam menjalankan bisnisnya. Jika hal tersebut terjadi, maka risiko bank untuk mengalami kebangkrutan akan semakin tinggi jika seluruh nasabah menarik uangnya. Jadi, kondisi yang pada mulanya hanya kepanikan massal, bisa meningkat menjadi kebangkrutan bank secara keseluruhan (Wibowo, 2018). Kondisi *rush*

*money* adalah kondisi yang sangat dihindari oleh setiap negara. Tapi, tetap saja ada beberapa oknum yang menyiarkan kabar *rush money* atau bank run demi kepentingan dan keuntungan pribadinya saja. Sehingga, sikap provokasi sering dilakukan oleh oknum tersebut untuk menebar rasa ketakutan berlebih di tengah-tengah masyarakat. Penyebab utama *rush money* adalah menurun atau hilangnya rasa kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah bank, ke bank tempatnya menyimpan mata uangnya tersebut. Hilangnya kepercayaan dari nasabah bank ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan manajemen perbankan, adanya korupsi di bank, atau kondisi krisis ekonomi yang terjadi dalam negara tersebut. Selain itu, *rush money* juga bisa terjadi karena kondisi politik yang semakin memanas dan adanya kerusuhan di berbagai daerah (Dwyer, 2015).

### Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Maksud utama mengadakan pengawasan adalah agar hasil senyatanya itu konsisten dengan rencana-rencana. Pengawasan berdasarkan pada informasi yang sampai, pada manajemen untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses

pelaksanaan tugas pengawasan (Xu *et al.*, 2017).

### Audit Eksternal

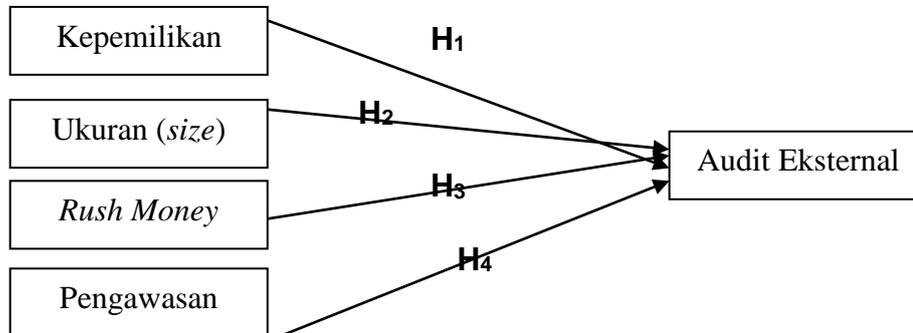
Permintaan *audit* adalah pemeriksaan laporan keuangan oleh jasa *audit eksternal* (akuntan publik) untuk memastikan bahwa laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan, bukan audit internal atau yang biasanya dilakukan oleh Badan Pengawas (BP) LPD itu sendiri. Permintaan *audit* merupakan permintaan audit LPD yang ada di Kabupaten Buleleng terhadap jasa *audit eksternal*. Dengan adanya wacana kebutuhan LPD akan *audit eksternal*, maka kita kembalikan kepada rencana pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) terkait keberadaan dana masyarakat di LPD yang tidak ter-cover LPS. Hal ini menjadi wacana yang mengemuka saat ini, seperti yang diberitakan oleh Bali Post tertanggal 1 Oktober (2014) sejauh ini LPD baru memiliki dana perlindungan

yang dianggarkan dari dana pembinaan yang telah disetor LPD. Dengan aset yang sudah diatas 9 triliun lebih, pembentukan LPS-LPD memang sangat diperlukan (Harrison & Sayogo, 2014; Muslim, 2020; Saputra dkk., 2019). Namun semua itu pastilah tidak mudah, mengingat semua harus dikaji dari bernagai sudut kebutuhan.

### Kerangka Penelitian

Konsep kepemilikan LPD yang dalam peraturan daerah dan ketentuan *awig-awig* adalah dimiliki oleh *krama desa pakraman* sehingga hal ini diindikasikan akan menuju musyawarah mufakat untuk mendapat persetujuan akan dilakukan audit eksternal. Hal ini pasti akan melalui pembahasan yang alot karena dianalisis dari seberapa pentingnya dilakukan audit eksternal. Faktor lain yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kepemilikan, ukuran (*size*), potensi *rush money* dan pengawasan.

**Bagan 1**  
**Kerangka Konsep Penelitian**



### Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Desain penelitian survei merupakan suatu perancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu obyek penelitian berdasarkan suatu situasi atau kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan atau nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti. Populasi dari penelitian ini adalah LPD di Provinsi Bali, sampai saat ini adalah berjumlah 1.327 LPD.

Responden dari penelitian ini adalah ketua LPD. Alasan pemilihan sampel ini adalah untuk spesifikasi penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi pengelolaan LPD secara parsial. Maka penentuan jumlah sampel menggunakan rumus yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

$e = 10\% = 0,10$

Dari hasil perhitungan rumus tersebut didapatkan 93 (sembilan puluh tiga) sampel LPD yang digunakan dalam penelitian ini. Masing-masing LPD diberikan 1 (satu) paket kuesioner untuk diberikan jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan responden yang akan menjawab kuesioner yang diberikan adalah pimpinan LPD karena mereka yang mengetahui mengenai lingkup pengelolaan LPD. Kuesioner tersebut telah dikelompokkan secara jelas pernyataan-pernyataan yang diajukan untuk setiap unsur dari variabel yang akan dinilai. Peneliti memberikan penjelasan mengenai pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Hal ini dimaksudkan agar responden mengerti maksud dari pertanyaan yang diberikan sehingga nantinya dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan tersebut.

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pada data yang akan dikumpulkan serta dalam menentukan alat pengumpulan datanya. Variabel yang akan dipakai dalam menganalisis permasalahan ini digunakan variabel bebas yaitu kepemilikan ( $X_1$ ), ukuran ( $X_2$ ), *rush money* ( $X_3$ ) dan pengawasan ( $X_4$ ). Sedangkan variabel terikatnya adalah kebutuhan *audit eksternal* LPD ( $Y$ ). Indikator masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu untuk variabel kepemilikan dapat diukur melalui konsep kekompakan, kesadaran, pengawasan bersama, kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kekeluargaan. Variabel ukuran (*size*) LPD dapat diukur dengan menggunakan konsep asset lancar, asset tetap, jumlah deposito, karakteristik depositan, jumlah nasabah dan pekerjaan nasabah. Variabel *rush money* dikaitkan dengan strategi lembaga keuangan dalam hal mengatasi potensi kerugian, variabel ini dapat diukur dengan menggunakan konsep strategi lembaga keuangan untuk langkah pencegahan seperti melihat intensitas penarikan uang nasabah,

kemungkinan peminjaman dana cadangan, adanya pembatasan jam kerja, dan adanya regulasi yang dilanggar. Variabel pengawasan dapat diukur dengan konsep penentuan standar, pengukuran, proses pelaksanaan kerja, usaha membandingkan, dan tindakan perbaikan. Sedangkan variabel independennya yaitu permintaan akan audit eksternal diukur dengan menggunakan konstruk yang memiliki konsep seperti *transparansi*, *akuntabilitas*, *potensi fraud accounting*, *human error*, *keadilan* dan *kompetensi pengelola*.

### Teknik Pengujian Hipotesis

Untuk menganalisis data, yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan *software SPSS for Windows Released 19.0 Programe*. Metode ini merupakan salah satu cara perhitungan koefisien regresi statistik yang tidak bias, efisiensi dan konsistensi. Metode ini dapat diformulasikan dalam rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Audit eksternal  
a : Konstanta  
 $X_1$  : Kepemilikan  
 $X_2$  : Ukuran (*size*)  
 $X_3$  : Potensi *Rush Money*  
 $X_4$  : Pengawasan  
e : *error*

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) digunakan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_0 = 0$  artinya variabel bebas secara parsial tidak punya pengaruh signifikan terhadap variabel terikat  
 $H_1 : b_1 \neq 0$  artinya variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

## Hasil dan Pembahasan

Rincian responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah berdasarkan jenis kelamin: laki-laki sebanyak 80 orang dan perempuan sebanyak 13 orang. Berdasarkan jabatan ; ketua sebanyak 70 orang, dan pegawai atau tata usaha sebagai pejabat sementara sebanyak 23 orang. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi item-total variabel lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70.

Hasil pengujian normalitas dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,104 yang lebih tinggi dari 0,05

Tabel 1. Koefisien Determinasi

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.928 <sup>a</sup>	.760	.849	.66756

Berdasarkan tabel uji ANOVA atau F test diperoleh F hitung sebesar 50.312 dengan probabilitas 0.000. oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi kepemilikan, skala, kewajiban, dan

sehingga dikatakan data berdistribusi normal. Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel bebas. Sedangkan, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel tidak signifikan pada 0.01 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji regresi variabel penelitian menyatakan bahwa dari *model summary* menunjukkan besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,760, hal ini berarti 76% variasi variabel kebutuhan *audit eksternal* dapat dijelaskan oleh variasi dari empat variabel independen yaitu kepemilikan, ukuran, *rush money*, dan pengawasan sedangkan sisanya (100%-76% = 24%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

pengawasan tidak sama dengan nol atau keempat variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kebutuhan *audit eksternal*. Hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi *R<sup>2</sup>* tidak sama dengan nol atau dapat diartikan signifikan

Tabel 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94.322	3	31.441	50.312	.000 <sup>a</sup>
	Residual	15.152	34	.446		
	Total	109.474	37			

Dari hasil uji regresi didapatkan juga hasil signifikansi dengan uji T yang menyatakan bahwa dari keempat variabel

independen yang dimasukkan dalam model ternyata hanyalah variabel *rush money* dan pengawasan yang signifikan,

hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi keempatnya yang bervariasi. Variabel kepemilikan memiliki nilai signifikansi 0.570, variabel ukuran 0.170, variabel *rush money* 0.000 dan pengawasan 0.001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel kebutuhan *audit eksternal* dipengaruhi oleh potensi *rush money* dan pengawasan dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = 94.904 + 0.320 X1 + 0.758 X2 + 0.026 X3 + 0.166 X4$$

Tabel 3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	94.904	3.652		1.143	.018
	X1	.320	.035	.037	.574	.570
	X2	.758	.353	.929	14.327	.170
	X3	.026	.458	.030	.458	.000
	X4	.166	.124	.319	3.169	.001

a. Dependent Variable: Y

Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak yaitu tidak ada pengaruh kepemilikan LPD terhadap tingkat kebutuhan akan audit eksternal LPD. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, Trisnadewi dkk., 2019) yang menyatakan bahwa keanggotaan/kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat permintaan akan *audit eksternal* di LPD. Hal ini terjadi karena keanggotaan LPD berbeda dengan keanggotaan lembaga lainnya, LPD yang dimiliki oleh *desa pakraman* akan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan tentang kebutuhan akan *audit eksternal*. Pertimbangan yang dimaksud adalah harus disetujui oleh semua *karma desa* dengan  *bendesa adat* sebagai pengambil keputusan tertinggi berdasarkan rapat desa yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menggunakan *audit eksternal* menjadi sangat perlu ketika memang terjadi kasus yang luar biasa terkait dengan keuangan LPD. Karena, LPD bertindak sebagai perpanjangan tangan keuangan desa untuk meningkatkan ekonomi setempat. LPD digunakan untuk menunjang bisnis setempat yang penting

dan untuk meningkatkan kondisi kehidupan anggota masyarakatnya (Saputra, Jayawarsa, dkk., 2019).

Hipotesis kedua ditolak yang menyatakan bahwa ukuran LPD tidak berpengaruh terhadap kebutuhan *audit eksternal*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Saputra, Jayawarsa, dkk., 2019) yang menyatakan bahwa ukuran lembaga keuangan tidak berpengaruh terhadap permintaan *audit eksternal* LPD. Ukuran LPD merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil (Najib & Rini, 2016). Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Akan tetapi berbeda dengan LPD di Bali, besar kecilnya skala LPD tetap dalam

pengambilan keputusan selalu berdasarkan *paruman* desa adat (Atmadja & Saputra, 2014). Segala bentuk pertanggungjawaban akan kembali dibahas dalam rapat tersebut. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan audit eksternal untuk LPD dikembalikan ke masyarakat untuk diputuskan bersama dengan pertimbangan-pertimbangan badan pengawas maupun pihak lainnya yang berkepentingan (Saputra, Trisnadewi, dkk., 2019).

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa potensi *rush money* memiliki pengaruh terhadap kebutuhan *audit eksternal* LPD, hal ini artinya hipotesis ketiga diterima. *Rush money* adalah menarik uang tunai di lembaga keuangan yang dilakukan serentak atau bersamaan oleh masyarakat dan dalam jumlah besar. Lembaga keuangan termasuk LPD kehabisan aliran dana sekaligus dalam waktu bersamaan. Lembaga keuangan mengalami krisis uang tunai, sehingga mengacaukan sistem yang ada. Hal ini yang ditakutkan dalam berbagai kasus yang pernah melilit LPD-LPD di Bali. *Rush* ini bisa saja dilakukan oleh nasabah karena kepercayaan public terhadap lembaga keuangan ini menurun, misalnya karena dana nasabah di korupsi atau tidak adanya transparansi dan lain sebagainya. Potensi-potensi ini sangat menuntut dilakukannya audit eksternal. Proses audit akan membawa titik terang penggelapan dana nasabah LPD yang selama ini disalahgunakan. Pihak LPD bersama desa adat akan memilih untuk melakukan audit eksternal untuk menghindari potensi terjadinya *rush money* di LPD (Wibowo, 2018).

Hasil pengujian hipotesis keempat diterima, yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kebutuhan *audit eksternal* di LPD. Hasil tersebut memberikan arti bahwa dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pengawasan, terlebih dalam pengambilan keputusan untuk dilakukan *audit eksternal* di LPD (Fukukawa & Mock, 2011). Pengawasan itu dimaksudkan untuk

mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidasesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan. Jadi pengawasan dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Maksud dari pernyataan tersebut adalah supaya pelaksanaan pengawasan diharapkan akan membawa hasil yang positif bagi tercapai tujuan (Putra & Latrini, 2018; Saputra, Trisnadewi, dkk., 2019; Xu *et al.*, 2017).

### **Simpulan, Keterbatasan dan Saran**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan, bahwa potensi *rush money* dan pengawasan berpengaruh terhadap kebutuhan *audit eksternal*, sehingga dalam konteks penghindaran kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD, terlebih sudah muncul indikasi kasus keuangan maka sesegera mungkin LPD bersama desa adat mengambil langkah untuk mengaudit keuangan LPD dengan melibatkan audit eksternal. Karena dalam setiap kasus penyelewengan dana LPD selalu muncul ketakutan akan terjadi *rush money* yang sudah pasti akan merusak siklus keuangan LPD tersebut. Pengawasan juga menjadi hal penting dalam tata kelola LPD dan hasil-hasil pengawasan ini akan dipertimbangkan setiap *paruman* desa adat dengan LPD. Untuk menyikapi kejadian atau temuan-temuan dari badan pengawas. Jika temuan tersebut mengarah pada kecurangan atau kasus penggelapan dana maka segera akan ditindak lanjuti untuk melakukan audit eksternal.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti Badan Pengawas LPD, *Desa Pakraman*, Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan,

Pemerintah Daerah dan LPD itu sendiri. Selain itu, dalam pengelolaan LPD agar tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan budaya sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan keputusan untuk menggunakan jasa *audit eksternal* untuk LPD. Tetapi bukan hanya faktor adat dan budaya saja, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kebutuhan *audit eksternal* LPD adalah memperhatikan sisi psikologis nasabah, perilaku masyarakat dan kepercayaan publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanyalah menguji variabel kepemilikan, ukuran, *rush money* dan pengawasan terhadap kebutuhan *audit eksternal* LPD. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel potensi *fraud*, deteksi, perilaku nasabah, serta melakukan pengujian data dengan metode eksperimen agar lebih mendalam dalam menyikapi kondisi *rush money* di LPD.

## Referensi

- Adiputra, I. M. P., Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2014). Culture of Tri Hita Karana as Moderating Effect of Locus of Control on the Performance of Internal Auditor (Studies in the Office of the Provincial Inspectorate in Bali). *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(22), 27–36.
- Astawa, I. (2012). *Kepemilikan Institusi dan Nilai-Nilai Harmoni dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2014). The Effect Of Emotional Spiritual Quotient (ESQ) To Ethical Behavior In Accounting Profession With Tri Hita Karana Culture's As A Moderating Variable. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(7), 187–197.
- Burke, C. S., Sims, D. E., Lazzara, E. H., & Salas, E. (2007). Trust in leadership: A multi-level review and integration. *The Leadership Quarterly*, 18, 606–632.
- <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2007.09.006>
- Choi, J. H., Kim, C., Kim, J. B., & Zang, Y. (2010). Audit office size, audit quality, and audit pricing. *Auditing: A Journal of practice & theory*, 29(1), 73-97.
- Davidson, R. A., & Neu, D. (1993). A note on the association between audit firm size and audit quality. *Contemporary accounting research*, 9(2), 479-488.
- Dewi, N. K. T. U., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2014). Pengaruh Pendapatan dan Biaya Terhadap Net Income Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Batumulapan di Kecamatan Nusa Penida. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1).
- Douglas, J. W., & Franklin, A. L. (2006). Putting the brakes on the rush to spend down end-of-year balances: Carryover money in Oklahoma state agencies. *Public Budgeting & Finance*, 26(3), 46-64.
- Dwyer, M. B. (2015). Trying to follow the money: Possibilities and limits of investor transparency in Southeast Asia's rush for.
- Fukukawa, H., & Mock, T. J. (2011). Audit risk assessments using belief versus probability. *Auditing*, 30(1), 75–99. <https://doi.org/10.2308/aud.2011.30.1.75>
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002>
- Haryono, S. (2017). Struktur kepemilikan dalam bingkai teori keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1).
- Lukman, H., & Harun, V. (2018). Faktor yang mempengaruhi deteksi kecurangan dalam persepsi auditor eksternal dan auditor internal. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 255. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.351>
- Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2003). *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur*

- Pemerintah Daerah , Peran APIP , Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance ( Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud ).* 17, 82–94.
- Mardiana, I. G. E. P., Sinarwati, N. K., Atmadja, A. T., & SE, A. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (SIA) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Susut. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 2(1).
- Murti, A. K., Trisnadewi, A. A. E., Citraresmi, L. D., & Saputra, K. A. K. (2018). SAK ETAP, Kualitas Laporan Keuangan dan Jumlah Kredit yang diterima UMKM. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 52–61. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v6i2.16300>
- Muslim, H. M. S. (2020). Moderating Ethics Auditors Influence of Competence, Accountability on Audit Quality. *Jurnal Akuntansi*, 23(3), 468. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i3.614>
- Najib, H., & Rini. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Spontan. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 19, 55–73.
- Putra, I. P. A. P. E., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 2155–2184.
- Putri, I. F., & Nasir, M. (2006). Analisis Persamaan Simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen dalam Perspektif Teori Keagenan. *Simposium Nasional Akuntansi*, 9, 23-26.
- Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(1).
- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. A. K., & Atmadja, A. T. (2019). Resurrection as a fading implication of accountability in financial management for village credit institution. *International Journal of Business, Economics and Law*, 19(5), 258–268.
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Saputra, K. A. K., Trisnadewi, A. A. E., Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2019). Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250>
- Sujana, E., & Saputra, K. A. K. (2020). Fraud Detection and Prevention Methods: Inspector ' s Auditor ' s Perception in Bali. *Journal of Advance Research in Dynamical and Control System*, 12(4), 8–16. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I4/20201413>
- Wibowo, A. C. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Di Indonesia Atas Munculnya Isu Rush Money.
- Xu, X., Li, Y., Liu, X., & Gan, W. (2017). Does religion matter to corruption? Evidence from China. *China Economic Review*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.11.005>
- Yang, X., Jin, Z., & Tan, J. (2019). Foreign residency rights and companies' auditor choice. *China Journal of Accounting Research*, 12(1), 93–112. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2019.01.002>